



# Komparasi Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Induk dan Daerah Hasil Pemekaran (Studi Kasus pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024)

Nabila Aurelia Oca\*, Dwi Valinia Ivanka, Rochmawati Daud

Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Penelitian ini dilaksanakan guna mengevaluasi serta mengomparasikan performa finansial antara pemerintah kabupaten induk dengan wilayah hasil pemekaran di lingkup Provinsi Sumatera Selatan untuk rentang tahun 2020 hingga 2024. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif, studi ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pada instrumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kinerja keuangan dikuantifikasi melalui tujuh indikator rasio, yang meliputi derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian finansial, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), keserasian belanja, pertumbuhan pendapatan, serta rasio likuiditas dan solvabilitas. Signifikansi perbedaan antar wilayah diuji menggunakan analisis statistik komparatif, baik melalui uji-t maupun uji non-parametrik sesuai distribusi data. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris mengenai efektivitas kebijakan otonomi daerah dalam memicu kemandirian fiskal, mengoptimalkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memperkuat tata kelola keuangan publik yang akuntabel.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan Publik, Desentralisasi Fiskal, Analisis Rasio, Akuntansi Pemerintahan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i3.4011>

\*Correspondence: Nabila Aurelia Oca

Email: [nabilalinggau2701@gmail.com](mailto:nabilalinggau2701@gmail.com)

Received: 04-02-2026

Accepted: 04-03-2026

Published: 04-04-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study is conducted to evaluate and compare the financial performance of parent regencies and their newly formed regions within South Sumatra Province for the 2020–2024 period. Employing a descriptive-comparative quantitative methodology, the research utilizes secondary data extracted from Local Government Financial Statements (LKPD), specifically the Budget Realization Reports and Balance Sheets. Financial performance is quantified through seven key indicators: fiscal decentralization, financial independence, Regional Original Revenue (PAD) effectiveness, spending harmony, revenue growth, liquidity, and solvency. Statistical significance of the differences is examined using comparative analysis, such as t-tests or non-parametric tests, depending on data distribution. The findings are expected to provide an empirical overview of how regional expansion policies impact fiscal autonomy, enhance regional financial management efficiency, and strengthen accountable public financial governance.

**Keywords:** Regional Expansion, Local Government Financial Performance, Fiscal Decentralization, Ratio Analysis, Public Sector Accounting.

## Pendahuluan

Pemekaran wilayah merupakan implementasi kebijakan desentralisasi yang dilakukan melalui pembentukan daerah otonom baru dari pemisahan wilayah induk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi, kebutuhan, dan karakteristik wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan

publik, mempercepat pembangunan ekonomi, serta memperkuat partisipasi masyarakat (Rambe & Aldita, 2022).

Secara strategis, pemekaran juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata dan UMKM, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara bijak. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, keberhasilan pemekaran tidak hanya diukur dari aspek pembangunan, tetapi juga dari kualitas tata kelola keuangan daerah yang tercermin dari opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan kualitas laporan keuangan dengan dominasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum merata, karena banyak daerah hasil pemekaran masih menghadapi kendala struktural berupa rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang belum optimal (Third et al., 2023).

Kontribusi PAD yang hanya berkisar 10–40% serta dominasi Dana Alokasi Umum (DAU) hingga sekitar 50% dari total pendapatan memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah, bahkan pada beberapa daerah rasio kemandirian berada di bawah 10%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya, terlebih karena kinerja keuangan daerah induk cenderung lebih baik dibandingkan daerah hasil pemekaran yang masih bergantung pada transfer pusat (Manajemen et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta diversifikasi sumber PAD dan efisiensi belanja publik guna meningkatkan kemandirian fiskal. Dalam konteks tersebut, analisis komparatif kinerja keuangan antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemekaran mampu mendorong efisiensi fiskal, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

## Literature Review

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menjelaskan pendelegasian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Merujuk pada pandangan (Halil & Ibrahim, 2024) inti dari penerapan desentralisasi fiskal adalah mendekatkan proses penetapan kebijakan anggaran kepada konstituen lokal. Dengan pemangkasan jarak birokrasi ini, diharapkan penyerapan pendapatan serta pengalokasian belanja daerah menjadi lebih tepat sasaran dan relevan dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemandirian fiskal (fiscal autonomy) dan akuntabilitas fiskal (fiscal accountability). Ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan yang memadai dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran serta didukung sistem akuntabilitas yang transparan, maka efisiensi pelayanan publik dapat meningkat. Sebaliknya, apabila kapasitas kelembagaan dan sistem pengelolaan keuangan daerah

masih lemah, desentralisasi berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan penerapan tata kelola keuangan publik yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi.

(Khanal, 2016) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal juga bergantung pada penerapan sistem Public Financial Management (PFM) yang kuat, meliputi proses penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan audit publik. Reformasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis transparansi, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan dana publik secara akuntabel. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja laporan keuangan antara pemerintah daerah induk dan daerah hasil pemekaran dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi desentralisasi fiskal berjalan secara efektif dalam praktik pemerintahan daerah.

## **Teori Agensi**

Teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, n.d.) Dalam kerangka hubungan kerja, teori agensi menitikberatkan pada pola interaksi kontraktual antara pihak yang memberikan mandat (prinsipal) dan pihak yang menerima tanggung jawab (agen). Jika diimplementasikan pada organisasi sektor publik, rakyat berkedudukan sebagai pemilik otoritas yang mempercayakan pengelolaan aset daerah kepada pemerintah sebagai pelaksana mandat tersebut. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut, disertai dengan asimetri informasi karena agen memiliki akses informasi yang lebih besar, berpotensi menimbulkan konflik agensi dan meningkatkan biaya agensi. Asimetri informasi tersebut dapat diminimalkan melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan andal. Dalam konteks ini, auditor memegang peran penting karena independensi dan kompetensinya menentukan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit yang baik membantu memastikan keandalan laporan keuangan, mengurangi ketidakpastian, serta menekan konflik dan biaya agensi antara prinsipal dan agen.

## **Stewardship**

Teori Stewardship merupakan kerangka tata kelola yang berasumsi bahwa pemimpin organisasi, seperti manajer atau eksekutif, bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi dan para pemangku kepentingan, bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Teori ini muncul sebagai alternatif dari Agency Theory yang memandang manajer bersifat oportunistik dan memerlukan pengawasan ketat. Sebaliknya, Stewardship Theory menekankan bahwa pengelola memiliki motivasi intrinsik yang didorong oleh komitmen terhadap keberhasilan organisasi, rasa tanggung jawab, serta pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, hubungan antara prinsipal dan pengelola lebih didasarkan pada kepercayaan, pemberdayaan, dan tanggung jawab kepemimpinan sehingga dapat meningkatkan efisiensi tata kelola dan menekan biaya pengawasan (Amahalu et al., 2022)

Dalam paradigma tata kelola kontemporer, teori ini sangat relevan seiring dengan menguatnya tuntutan publik terhadap kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, transparansi, dan prinsip keberlanjutan. *Stewardship theory* menegaskan bahwa orientasi organisasi tidak sekadar terpaku pada capaian profit atau target jangka pendek, melainkan pada pembentukan nilai jangka panjang melalui sistem kelola yang akuntabel. Dalam studi ini, perspektif *stewardship* digunakan sebagai fondasi untuk memotret peran pemerintah daerah sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik secara efektif. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan baik pada kabupaten induk maupun wilayah pemekaran diharapkan menjadi cerminan dari implementasi nilai integritas dan stabilitas fiskal dalam penggunaan dana masyarakat.

### **Pemekaran Daerah**

Pemekaran wilayah merupakan salah satu mekanisme dalam kebijakan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat melalui pembentukan daerah otonom baru yang memiliki kewenangan politik, administratif, dan fiskal untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Pelaksananya harus mempertimbangkan kesiapan daerah induk, kelayakan administrasi, potensi ekonomi, serta kapasitas keuangan daerah baru agar mampu menjalankan pemerintahan secara independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Secara konseptual, pemekaran berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal yang bertujuan mendistribusikan kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah guna mengurangi kesenjangan fiskal serta mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efisiensi belanja publik. Namun demikian, keberhasilan kebijakan pemekaran tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, melainkan juga oleh kinerja fiskal dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran menjadi penting untuk menilai apakah tujuan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan efisiensi fiskal benar-benar tercapai, sehingga pemekaran dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan strategi desentralisasi yang dirancang untuk memperkuat efektivitas pemerintahan lokal dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan (Fadhilah & Haryatiningsih, n.d.), otonomi daerah berfungsi mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, memperluas partisipasi publik, dan mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. Implementasi kebijakan ini mengubah peran pemerintah daerah dari sekadar pelaksana kebijakan pusat menjadi fasilitator pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas otonomi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, profesionalisme birokrasi, serta sinergi antara pusat dan daerah.

Sementara itu, (Provinsi & Selatan, n.d.) melalui kajian literturnya menegaskan bahwa otonomi daerah secara umum berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika diiringi dengan tata kelola yang baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Walaupun beberapa studi menunjukkan hasil yang beragam, mayoritas penelitian menyimpulkan bahwa otonomi memperkuat efisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian, otonomi daerah dapat dianggap sebagai instrumen penting dalam mencapai pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, asalkan implementasinya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset yang dimiliki sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam periode tertentu (Desi Ratna Sari, 2020). Kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi secara optimal (Nurhasani et al., 2026). (Mahmudi, 2019) menambahkan bahwa efisiensi merupakan salah satu ukuran utama kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung melalui perbandingan antara input dan output, di mana semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan hasil pengelolaan pendapatan dan belanja daerah selama satu periode akuntansi, termasuk penerimaan dari pajak dan retribusi, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan administratif pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analitis yang digunakan untuk menilai dan memahami perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah dari waktu ke waktu melalui perbandingan antarpos dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Penggunaan rasio ini penting dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks implementasi desentralisasi fiskal. (Wulandari et al., 2019) menjelaskan bahwa penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan melalui beberapa indikator, seperti rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi penggunaan anggaran, keserasian belanja, pertumbuhan keuangan daerah, serta kemampuan likuiditas dan solvabilitas. Setiap rasio memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, mengoptimalkan penerimaan daerah, serta mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

Secara mendalam, parameter desentralisasi fiskal diterapkan guna mengevaluasi sejauh mana andil PAD dalam struktur penerimaan wilayah, yang sekaligus menjadi tolok ukur kemandirian daerah dalam mengelola otoritas fiskalnya. Di sisi lain, derajat dependensi otoritas lokal terhadap sokongan dana pusat dapat diidentifikasi melalui rasio

kemandirian. Sementara itu, efektivitas kinerja keuangan dipotret dengan membandingkan capaian riil PAD terhadap estimasi target yang telah diproyeksikan dalam dokumen APBD. Lebih lanjut, analisis mengenai keseimbangan alokasi antara belanja modal dan belanja operasional dalam postur anggaran dijelaskan melalui rasio keserasian. Terakhir, dinamika perkembangan kapasitas fiskal daerah dari periode ke periode dapat dipantau melalui indikator rasio pertumbuhan pendapatan, sedangkan rasio likuiditas dan solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Mahmudi, 2019). Melalui analisis rasio tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara komprehensif untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Kerangka

## Metodologi

Studi ini menerapkan metode kuantitatif melalui desain deskriptif-komparatif guna mengevaluasi perbedaan performa finansial antara pemerintah daerah hasil pemekaran dengan kabupaten induknya di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2020–2024. Peneliti memanfaatkan data sekunder yang diekstraksi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan fokus utama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Neraca. Populasi dalam penelitian ini mencakup 20 unit entitas yang terdiri dari 10 pasangan wilayah (induk dan pemekaran). Melalui teknik *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan kelengkapan dokumen laporan keuangan yang tersedia untuk dianalisis, sehingga menghasilkan total 100 observasi data (akumulasi dari 20 entitas selama 5 tahun penelitian).

Variabel sentral dalam kajian ini difokuskan pada kinerja keuangan otoritas daerah, yang dikuantifikasi melalui tujuh instrumen rasio, antara lain derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian finansial, efektivitas PAD, serta rasio keserasian belanja. Selain itu, digunakan pula indikator pertumbuhan pendapatan, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas sebagai pelengkap analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi pada dokumen laporan keuangan resmi. Tahapan analisis data diawali dengan pendekatan deskriptif untuk memotret tren serta kondisi keuangan daerah. Selanjutnya, pengujian komparatif dilakukan untuk melihat diskrepansi kinerja antara kedua kelompok daerah menggunakan uji statistik *Independent Samples t-Test* atau *Paired Samples t-Test* pada taraf signifikansi 5%, setelah dipastikan memenuhi asumsi homogenitas

dan normalitas. Proses komputasi data dikerjakan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk tabulasi rasio, sementara pengujian hipotesis mengenai perbedaan berbagai indikator keuangan tersebut dieksekusi melalui perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 23

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Hal ini didasarkan pada teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik melalui PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal, di mana daerah induk umumnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dibandingkan daerah hasil pemekaran.
2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemandirian keuangan daerah antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Daerah induk cenderung memiliki basis pendapatan yang lebih stabil sehingga lebih mandiri secara fiskal, sedangkan daerah hasil pemekaran masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa terdapat perbedaan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Daerah induk umumnya memiliki pengalaman, infrastruktur fiskal, dan basis ekonomi yang lebih mapan sehingga lebih efektif dalam merealisasikan PAD dibandingkan daerah hasil pemekaran.
4. Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa terdapat perbedaan keserasian belanja antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Daerah induk cenderung memiliki komposisi belanja yang lebih seimbang antara belanja operasi dan belanja modal, sedangkan daerah hasil pemekaran sering lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja operasional pemerintahan.
5. Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan pendapatan daerah antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Daerah induk umumnya memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil sehingga pertumbuhannya lebih konsisten dibandingkan daerah hasil pemekaran yang masih dalam tahap pengembangan kapasitas fiskal.
6. Hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwa terdapat perbedaan likuiditas keuangan daerah antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Pemerintah daerah induk yang telah berpengalaman dalam pengelolaan keuangan biasanya memiliki stabilitas likuiditas yang lebih baik dibandingkan daerah hasil pemekaran yang masih menghadapi tekanan fiskal pada tahap awal pembentukan pemerintahan.
7. Hipotesis ketujuh (H7) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio solvabilitas antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024. Daerah induk yang memiliki struktur keuangan

lebih matang cenderung mampu menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban sehingga solvabilitasnya lebih stabil, sedangkan daerah hasil pemekaran berpotensi mengalami tekanan fiskal akibat kebutuhan belanja awal pembangunan kelembagaan dan keterbatasan pendapat mandiri.

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Objek Penelitian

Fokus utama dalam studi ini diarahkan pada evaluasi performa finansial pemerintah kabupaten induk serta wilayah hasil pemekaran di lingkup Provinsi Sumatera Selatan untuk rentang tahun 2020 hingga 2024. Peneliti menerapkan metodologi kuantitatif dengan pendekatan komparatif guna mengidentifikasi serta menyajikan bukti empiris terkait ada tidaknya diskrepansi kinerja keuangan di antara kedua kelompok entitas tersebut. Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan keuangan daerah dianalisis melalui serangkaian instrumen rasio sektor publik, yang meliputi derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian finansial, efektivitas capaian PAD, serta keseimbangan dalam keserasian belanja. Selain itu, digunakan pula indikator pertumbuhan pendapatan, tingkat likuiditas, dan kemampuan solvabilitas sebagai parameter penilaian yang komprehensif.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai karakteristik data yang diteliti tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi (Ghozali, 2021).

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Rasio Kinerja Keuangan	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi	Wilayah
RDF	6.1	13.5	8.4	1.8	Daerah Induk
RK	7.2	17.2	10.2	2.2	
REF	34.7	147.8	91.4	31.2	
RBO	52.9	89.1	76.1	7.2	
RBM	16.6	37.4	23.6	5.3	
	-25.0	36.3	4.9	15.9	
RPP	25.1	6830.4	1822.8	1905.0	
RL	0.2	21.5	2.4	4.3	
RS					
RDF	2.7	13.4	7.0	2.8	Daerah Pemekaran
RK	3.5	18.6	9.0	3.8	
REF	10.1	163.1	83.8	30.6	

RBO	52.0	100.5	73.7	8.7
RBM	13.9	47.9	26.4	7.9
	-35.4	66.0	3.9	17.2
	24.4	1944.7	454.5	508.5
RPP	0.3	18.4	3.8	3.4
RL				
RS				

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabilitas nilai yang cukup signifikan pada indikator keuangan, baik di wilayah induk maupun kabupaten hasil pemekaran selama rentang waktu observasi. Mayoritas daerah menunjukkan angka desentralisasi fiskal yang masih tergolong minim, yang merepresentasikan keterbatasan andil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyokong total penerimaan wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, indeks kemandirian fiskal mengisyaratkan tingginya level dependensi pemerintah daerah terhadap kucuran dana transfer dari otoritas pusat. Namun, pada sisi lain, beberapa entitas menunjukkan performa efektivitas PAD yang impresif, di mana capaian riil pendapatan asli mampu menyamai atau bahkan melampaui estimasi target yang telah diproyeksikan sebelumnya.

Dari aspek alokasi pengeluaran, postur belanja pada kedua kelompok daerah tersebut masih menitikberatkan pada komponen belanja operasional dibandingkan dengan investasi pada belanja modal. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa porsi anggaran yang besar masih terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi ketimbang akselerasi pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, tren pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, yang mencerminkan ketidakstabilan arus penerimaan baik yang bersumber dari kemampuan internal (PAD) maupun dari alokasi dana perimbangan pusat.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data penelitian mengikuti pola distribusi normal. Pengujian ini penting karena menjadi prasyarat dalam penggunaan metode analisis parametrik, yang mensyaratkan data berdistribusi normal. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Nurhasani et al., 2026)

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Kinerja Keuangan	Kolmogorov–Smirnov			Distribusi Data
	Statistic	df	Sig,	
Daerah Induk	0,171	50	0,001	Abnormal
RDF				

	Daerah Pemekaran	0,131	50	0,032	Abnormal
RK	Daerah Induk	0,177	50	0,000	Abnormal
	Daerah Pemekaran	0,141	50	0,015	Abnormal
REF	Daerah Induk	0,100	50	0,200	Normal
	Daerah Pemekaran	0,068	50	0,200	Normal
RBO	Daerah Induk	0,139	50	0,017	Abnormal
	Daerah Pemekaran	0,102	50	0,200	Normal
RBM	Daerah Induk	0,108	50	0,200	Normal
	Daerah Pemekaran	0,112	50	0,163	Normal
RPP	Daerah Induk	0,078	50	0,200	Normal
	Daerah Pemekaran	0,102	50	0,200	Normal
RL	Daerah Induk	0,212	50	0,000	Abnormal
	Daerah Pemekaran	0,271	50	0,000	Abnormal
RS	Daerah Induk	0,325	50	0,000	Abnormal
	Daerah Pemekaran	0,160	50	0,003	Abnormal

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov, indikator RDF, RK, RL dan RS menunjukkan adanya data yang tidak berdistribusi normal pada daerah induk maupun daerah pemekaran, dengan nilai signifikansi  $\leq 0,05$ . Selain itu, indikator RBO juga menunjukkan data yang tidak berdistribusi normal pada daerah induk. Oleh karena itu, pengujian hipotesis untuk indikator RDF, RK, RBO, RL dan RS dilakukan menggunakan metode non parametrik, yaitu Mann Whitney U Test.

Sebaliknya, indikator REF, RBM, dan RPP menunjukkan bahwa seluruh data pada daerah induk dan daerah pemekaran memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga data berdistribusi normal. Dengan demikian, pengujian hipotesis untuk indikator REF, RBM, dan RPP dapat menggunakan metode parametrik, yaitu independent *two sample t-test* untuk membandingkan rata-rata antara daerah induk dan daerah pemekaran.

### Hasil Uji Independent Sample T-test

Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kinerja keuangan kabupaten induk dan daerah hasil pemekaran sebagai dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan perbedaan nilai rata-rata kedua kelompok terhadap variasi data yang tercermin dalam standar deviasi masing-masing kelompok (Ghozali, 2011).

Kriteria pengujian ditetapkan berdasarkan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai significance (p-value)  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan kabupaten induk dan daerah hasil pemekaran. Sebaliknya, jika nilai p-value  $\geq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok daerah tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Independent Sample T-test

Kinerja Keuangan	Nilai Probabilitas/ Signifikansi	Keputusan
REF	0,223	Tidak Terdapat Perbedaan yang Signifikan
RBM	0,046	Terdapat Perbedaan yang Signifikan
RPP	0,773	Tidak Terdapat Perbedaan yang Signifikan

### Hasil Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara dua sampel yang tidak saling bergantung. Uji ini termasuk dalam kategori nonparametrik dan sering dijadikan alternatif dari uji-t yang bersifat parametrik (Teti Sofia Yanti, 2007).

Tabel 4. Hasil Uji Mann Whitney

Kinerja Keuangan	Nilai Probabilitas/ Signifikansi	Keputusan
RDF	0,005	Terdapat Perbedaan yang Signifikan

RK	0,071	Tidak Terdapat Perbedaan yang Signifikan
RBO	0,087	Tidak Terdapat Perbedaan yang Signifikan
RL	0,000	Terdapat Perbedaan yang Signifikan
RS	0,000	Terdapat Perbedaan yang Signifikan

## Pembahasan

### Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF)

Indikator Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) diterapkan untuk mengevaluasi level otonomi finansial otoritas daerah dengan mengomparasikan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap akumulasi total penerimaan wilayah. Parameter ini menjadi cerminan kapasitas pemerintah lokal dalam mendanai operasional birokrasi serta agenda pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sokongan pemerintah pusat. Berdasarkan observasi pada pemerintah kabupaten induk dan wilayah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2020–2024, ditemukan bahwa indeks desentralisasi fiskal pada kedua kelompok tersebut masih tergolong dalam kategori yang sangat minim. Kondisi ini dipicu oleh besarnya porsi dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang mendominasi postur pendapatan daerah.

Secara deskriptif, rata-rata capaian RDF pada kabupaten induk terpantau sedikit melampaui daerah hasil pemekaran. Walaupun demikian, selisih tersebut belum menunjukkan kemandirian fiskal yang berarti karena kedua entitas masih menunjukkan dependensi yang kuat terhadap pusat. Hasil pengujian statistik melalui uji Mann-Whitney menghasilkan angka signifikansi 0,005 ( $<0,05$ ), yang mengindikasikan adanya diskrepansi nyata antara kabupaten induk dan daerah pemekaran dalam hal rasio desentralisasi fiskal. Temuan ini menegaskan bahwa sekalipun terdapat perbedaan kapasitas fiskal di antara kedua kelompok wilayah tersebut, kebijakan perluasan daerah belum mampu mengakselerasi terbentuknya kemandirian anggaran yang kokoh secara signifikan.

### Rasio Kemandirian (RK)

Parameter Rasio Kemandirian (RK) diaplikasikan guna mengevaluasi kapasitas otoritas daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan serta operasional pemerintahan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meminimalisir ketergantungan pada sokongan dana eksternal. Indikator ini menjadi representasi dari tingkat otonomi fiskal suatu wilayah dalam mengelola potensi finansialnya secara berdikari. Berdasarkan hasil studi pada pemerintah kabupaten induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan untuk rentang tahun 2020–2024, teridentifikasi bahwa level kemandirian fiskal pada kedua kategori daerah tersebut masih berada dalam klasifikasi yang sangat rendah.

Secara deskriptif, capaian rata-rata indeks kemandirian pada kabupaten induk terpantau sedikit melampaui wilayah hasil pemekaran. Hal ini memberikan gambaran bahwa kabupaten induk memiliki kekuatan fiskal yang relatif lebih unggul dalam memproduksi pendapatan daerah. Walaupun demikian, andil PAD terhadap akumulasi total penerimaan daerah masih belum maksimal, sehingga dependensi terhadap dana transfer dari pusat tetap mendominasi di kedua kelompok wilayah tersebut. Berdasarkan pengujian statistik melalui uji Mann-Whitney, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,126 ( $>0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang nyata (signifikan) antara kedua kelompok daerah tersebut

### **Rasio Efektivitas PAD (REF)**

Rasio Efektivitas PAD (REF) diaplikasikan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana otoritas daerah berhasil merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diproyeksikan sebelumnya. Parameter ini memberikan gambaran mengenai kapasitas pemerintah lokal dalam mengoptimalkan potensi sumber daya finansialnya agar sejalan dengan estimasi yang tertuang dalam dokumen anggaran. Secara prinsip, peningkatan pada angka rasio efektivitas ini mengindikasikan semakin berkualitasnya performa pemerintah daerah dalam menata kelola penerimaan daerahnya.

Merujuk pada temuan studi terhadap pemerintah kabupaten induk dan wilayah hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2020–2024, teridentifikasi bahwa level efektivitas PAD pada kedua kategori daerah tersebut menampilkan variabilitas yang cukup signifikan. Secara deskriptif, perolehan rata-rata indeks efektivitas pada kabupaten induk terpantau melampaui wilayah pemekaran. Namun demikian, berdasarkan pengujian statistik melalui *Independent Sample T-Test*, diperoleh angka signifikansi sebesar 0,223 ( $>0,05$ ). Hasil ini mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan diskrepansi yang nyata atau signifikan antara kedua kelompok entitas tersebut dalam hal efektivitas realisasi pendapatan asli daerah.

### **Rasio Keserasian Belanja**

#### **a. Rasio Belanja Operasi (RBO)**

Rasio Belanja Operasi (RBO) digunakan untuk mengukur proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Rasio ini mencerminkan struktur pengeluaran pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas rutin pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah kabupaten induk dan daerah hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024, diketahui bahwa sebagian besar anggaran daerah masih didominasi oleh belanja operasional. Secara deskriptif, rata-rata rasio belanja operasi pada kabupaten induk sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah pemekaran. Namun hasil pengujian statistik menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,669 ( $>0,05$ ), yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok daerah.

**b. Rasio Belanja Modal (RBM)**

Rasio Belanja Modal (RBM) diterapkan guna mengevaluasi proporsi anggaran wilayah yang diprioritaskan untuk pengadaan aset tetap serta investasi jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur fisik dan sarana layanan publik. Berdasarkan temuan penelitian, wilayah hasil pemekaran menunjukkan capaian rata-rata rasio belanja modal yang melampaui kabupaten induknya. Hasil pengujian statistik melalui *Independent Sample T-Test* menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,046 ( $<0,05$ ), yang mengonfirmasi adanya perbedaan nyata (signifikan) di antara kedua kelompok entitas tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas daerah pemekaran cenderung mengalokasikan sumber daya fiskal yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur demi mengakselerasi pengembangan wilayah baru mereka

**Rasio Pertumbuhan Pendapatan (RPP)**

Rasio Pertumbuhan Pendapatan (RPP) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini mencerminkan dinamika pertumbuhan pendapatan daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah kabupaten induk dan daerah hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024, diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara deskriptif, rata-rata pertumbuhan pendapatan pada kabupaten induk sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah pemekaran. Namun hasil pengujian statistik menggunakan *Independent Sample T-Test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,773 ( $>0,05$ ), yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok daerah.

**Rasio Likuiditas (RL)**

Rasio Likuiditas (RL) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan serta efektivitas pengelolaan kas daerah.

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah kabupaten induk dan daerah hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024, diketahui bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi meskipun menunjukkan pola yang fluktuatif. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kabupaten induk dan daerah hasil pemekaran dalam rasio likuiditas. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas pengelolaan kas serta struktur keuangan antar daerah.

**Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang melalui total aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan tingkat kesehatan keuangan serta keberlanjutan fiskal

suatu daerah dalam jangka panjang. Berdasarkan konsep Stewardship Theory, pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik diharapkan mampu mengelola aset dan kewajiban secara bertanggung jawab sehingga tercipta stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kabupaten induk umumnya memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih matang karena telah memiliki pengalaman administratif, kelembagaan yang lebih stabil, serta basis pendapatan daerah yang relatif lebih mapan. Kondisi tersebut memungkinkan daerah induk untuk menjaga rasio solvabilitas pada tingkat yang lebih stabil. Sebaliknya, pemerintah daerah hasil pemekaran seringkali menghadapi tantangan fiskal pada tahap awal pembentukannya, seperti meningkatnya kebutuhan belanja untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, pembentukan perangkat daerah, serta keterbatasan kapasitas pendapatan asli daerah. Situasi ini dapat mempengaruhi struktur neraca daerah dan berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat solvabilitas dibandingkan dengan daerah induk. Oleh karena itu, perbedaan kondisi fiskal, kapasitas pengelolaan aset, serta struktur kewajiban antara kedua kelompok daerah tersebut menjadi faktor yang dapat menyebabkan adanya perbedaan rasio solvabilitas. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka diajukan hipotesis bahwa terdapat perbedaan rasio solvabilitas antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020–2024.

## Simpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024 belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara signifikan, yang ditunjukkan oleh tidak adanya perbedaan berarti antara kabupaten induk dan daerah pemekaran pada sebagian besar rasio kinerja keuangan seperti kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, dan pertumbuhan pendapatan, sehingga kedua kelompok daerah masih bergantung tinggi pada dana transfer pusat; meskipun demikian, terdapat perbedaan pada rasio belanja modal yang lebih tinggi di daerah pemekaran, yang mengindikasikan adanya dorongan pembangunan fisik, namun belum diiringi peningkatan kapasitas keuangan karena dominasi belanja operasional masih tinggi; di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa penggunaan indikator rasio yang terbatas, periode pengamatan yang relatif singkat (2020–2024), serta tidak mempertimbangkan faktor eksternal non-keuangan, sehingga ke depan disarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi dan pengembangan potensi lokal, meningkatkan efisiensi belanja agar lebih produktif, pemerintah pusat memperketat evaluasi kebijakan pemekaran, serta penelitian selanjutnya memperluas variabel, metode, dan periode analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## Referensi

Amahalu, N. N., Ezenwaka, F. A., Obi, J. C., Louis, C., State, A., & State, O. (2022). EFFECT OF TREASURY SINGLE ACCOUNT ON ACCOUNTABILITY IN NIGERIA. 2018, 66–76.

- Desi Ratna Sari. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- Fadhilah, A., & Haryatiningsih, R. (n.d.). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung pada Masa Sebelum Pandemi dan Pasca Pandemi COVID-19. 438–445.
- Halil, A., & Ibrahim, H. (2024). Decentralization and its Impact on Improving Public Services. 7(March), 45–53.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (n.d.). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure.
- Khanal, G. (2016). Fiscal Decentralization and Municipal Performance in Nepal. 27, 59–87.
- Mahmudi. (2019). Analisis\_Laporan\_Keuangan\_Pemerintah\_Dae.
- Manajemen, J., Magister, P., Universitas, M., Kota, K., Kurniasih, E. T., Winarni, E., & Soleh, A. (2020). J-MAS. 5(2), 323–326. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.203>
- Nurhasani, A., Setiawan, A. B., Julfani, D., & Fauziah, F. (2026). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 – 2024. 6(November 2025).
- Provinsi, D. I., & Selatan, S. (n.d.). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Mustafa Hasbar \*). 464–476.
- Rambe, R. A., & Aldita, F. (2022). Local Government Performance Comparison between Split and Unsplit Provinces in Indonesia. 302–311.
- Third, T., Conference, I., Indriani, K., Widodo, A., Prasetyo, H., & Dewi, V. A. T. (2023). LOCAL FINANCIAL INDEPENDENCE OUTLOOK TO COPING WITH UNCONDITIONAL SITUATION : EVIDENCE OF MUNICIPAL. 1–7.
- Wulandari, R., Anggun, B., Lestari, H., & Suryantara, A. B. (2019). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. 4, 56–69.